

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-HDW (*ELECTRONIC HUMAN DEVELOPMENT WORKER*) DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Rasta Sarita¹, Aprilia Lestari², Alip Susilowati Utama³

Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl.Ratu Penghulu No.2301, Karang Sari, Baturaja

Email: rastasarita06@gmail.com, varie2104@gmail.com, alipsusilo93@gmail.com

ABSTRAK

E-Human Development Worker adalah sebuah aplikasi yang sebagai suatu upaya yang dikeluarkan pemerintah guna mempermudah efisiensi dan efektivitas dalam hal mencatat data stunting yang ada di desa.. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi penggunaan e-HDW serta melihat Faktor Pendukung dan Penghambat dalam menjalankannya. Penelitian yang dilaksanakan sejak september 2021 menggunakan teori Kebijakan Model *George C. Edward III* dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pada variable komunikasi yang dilakukan dalam pelatihan penggunaan aplikasi e-HDW memiliki 2 indikator yaitu bimbingan teknis kepada anggota Kader Pembangunan Manusia dan Sosialisasi kepada masyarakat. Terkait disposisi dengan kecenderungan pelaksana dalam implelementasi kebijakan tidak ada masalah mengingat e-HDW dikelola oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai admin *Dashboard* yang diangkat melalui kebijakan Kepala Daerah dan aplikasi itu digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia. Terkait Struktur Birokrasi, Admin *Dashboard* telah diberikan Surat Keputusan dari Bupati Ogan Komering Ulu dan anggota Kader Pembangunan Manusia telah diberikan Surta Keputusan dari Desa maing-masing dan diberikan juga *Standar Operasional Procedur* (SOP) dalam menjalankan penggunaan aplikasi e-HDW. Faktor pendukung tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang mulai memadai, sedangkan Faktor Penghambat ialah jaringan sinyal dan masih banyak anggota KPM yang kurang aktif dalam memberi laporan.

Kata Kunci: Implementasi, E-HDW

Pendahuluan

Stunting sangat mungkin merupakan masalah kesehatan utama, terutama di negara miskin dan agraris. Hambatan adalah jenis gangguan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan langsung pada bayi

karena penumpukan kelaparan yang bertahan cukup lama, pergi dari kehamilan hingga usia dua tahun. Kurangnya nutrisi yang sehat selama pertumbuhan dan perkembangan remaja akan menghambat pergantian peristiwa yang sebenarnya, meningkatkan kesedihan,

mengganggu siklus psikologis remaja, juga, bahkan alasan lewat. Anak-anak yang memiliki masalah Menghambat memiliki pertarungan mengurangi kapasitas ilmiah, efisiensi, dan kemungkinan pertarungan menghadapi penyakit degeneratif di kemudian hari. Sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), norma untuk perkembangan anak tergantung pada file panjang tubuh untuk usia (PB/U) atau tinggi badan untuk usia (TB/U) dengan titik putus (z-score) tidak persis - 2 SD.¹

Dari data WHO, Indonesia mendapat peringkat ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017, dengan angka mencapai 36,4%. Namun, pada tahun 2019 menurut Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas), angkanya mengalami penurunan hingga 27,67%. Yang mana naik turunnya tentang angka stunting ini akan dirilis oleh riskesdas setiap lima tahun sekali. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka tersebut dari tahun ke tahun. Program akselerasi penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor kesehatan, dengan target mencapai 14% pada 2024 mendatang. Data status pemantauan gizi menunjukkan angka stunting di Sumatera Selatan sebanyak 29%.² Sebanyak 11.863 Bayi Lima Tahun

¹ Norsanti.2021 "Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan(Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar)." Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan 3.1.hal 11

²[https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/prevalensi-balita-penderitastunting-di-indonesia\(diakses, 16 september 2021\)](https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/prevalensi-balita-penderitastunting-di-indonesia(diakses, 16 september 2021))

(Balita) di Sumatera Selatan Balita yang mengalami *stunting* atau kondisi gagal tumbuhkanak balita. Jumlah tersebut berdasarkan laporan dari aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang diukur pada february 2020.

Dari 17 Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan salah satunya yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, di Kabupaten Ogan Komering Ulu *stunting* juga menjadi fokus penurunan bagi pemerintah. Berikut data *stunting* dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2018-2020:

Tabel 1.1
Data Angka Stunting OKU 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Balita	Balita yang di Ukur	Balita dengan Stunting
1	2018	43.779	26.298 (60,06%)	1.188 (4,5%)
2	2019	33.317	13.298 (39,91%)	910 (6,84%)
3	2020	42.007	19.754 (47,02%)	921 (4,6%)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten OKU

Menghadapi persoalan *stunting*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berfokus pada percepatan penanganan hambatan dengan melakukan pendekatan koordinasi pemanfaatan Dana Desa untuk menghambat penanggulangan di *stunting* di Indonesia.

Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, khususnya pada pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa prioritas

penggunaan dana desa diharapkan dapat member manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa yang dimaksud dipertegas pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa peningkatan tersebut diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*Stunting*)³.

Pada pelaksanaan peningkatan pelayanan publik di Desa, pendampingan dalam pencegahan *stunting* di Desa dilakukan oleh tenaga pendamping masyarakat desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Dalam konteks ini KPM menjalankan tugasnya untuk pendampingan dan pencegahan *stunting* itu dilakukan dengan cara mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran penjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini *stunting*, kemudian KPM mendata sasaran rumah tangga 100 HPK(Hari Pertama Kelahiran) terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan buah hati, memantau layanan pencegahan *stunting*, memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak, memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif. Selain sosialisasi cara kerja KPM juga menyusun data melalui aplikasi e-HDW.

Berdasarkan peraturan menteri salah satu alat yang digunakan Kader Pembangunan Manusia adalah e-HDW. Berdasarkan surat edaran Menteri Desa PDTT(Pembangunan Desa Tertinggal dan Transimgrasi) No.13 Tahun 2020 tetntang pemanfaatan penggunaan aplikasi e-HDW. Aplikasi e-HDW atau e-Human Development Worker adalah aplikasi yang digawangi oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal PPMD, Kementerian Desa PDTT.

Manfaat aplikasi ini untuk menciptakan lebih banyak waktu bagi KPM untuk lebih banyak melakukan advokasi masyarakat, Mempermudah masyarakat dan Pemerintah Desa dalam menyusun usulan tentang kegiatan pencegahan *stunting* di Desa, Mempermudah Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merumuskan kebijakan tentang program/kegiatan pencegahan *stunting* dengan berbasis data rill dan ter-update.Pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Ogan Komering Ulu, KPM menggunakan aplikasi e-HDW untuk mempermudah pekerjaan dari KPM yang dilaksanakan oleh Desa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana setiap Desa memiliki satu orang Kader Pembangunan Manusia, persoalan yang dihadapi terkait dengan kondisi jaringan yang ada dan juga aplikasi ini hanya bisa diakses jika diberi izin masuk oleh

³ Peraturan Mentri Desa PDTT No.16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019,pasal 6

tenaga ahli Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan penggunaan aplikasi e-HDW dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kebijakan

Menurut Dwiyanto, pemerintahan Dengan banyaknya entertainer, interest dan issue gathering, diharapkan lebih banyak pilihan pendekatan yang dapat memenuhi populasi umum (mitra) daripada isu-isu yang dilihat oleh area pribadi..⁴ Dalam gagasan strategi, kita dapat berhipotesis bahwa pertimbangan kita dalam berkonsentrasi pada pendekatan terbuka ditujukan pada apa yang benar-benar dilakukan oleh spesialis publik dan bukan pada apa perlu dilakukan. Secara umum Pemikiran strategi menyinggung tiga hal, yaitu perspektif, perkembangan kegiatan dan pedoman. Ketiga hal ini diisi sebagai aturan bagi kepala suku untuk menyelesaikan strategi.

2. Teori Edward III

Menurut Riant Nugroho mengutip Edward III, model pelaksanaan pengaturan publik ini menunjukkan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi,

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi⁵.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program/pengaturan dapat dipadukan dengan tepat untuk menghindari perubahan pendekatan dan proyek. Hal ini penting karena semakin tinggi pengumpulan informasi objektif tentang program, semakin rendah tingkat penolakan dan kesalahan dalam menerapkan proyek dan pendekatan dalam kenyataan.
- b. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi yang menyinggung dekat pelaksana strategi/program. Karakter signifikan yang digerakkan oleh pelaksana adalah dapat dipercaya, tanggung jawab, dan demokratisasi. Pelaksana yang memiliki tanggung jawab dan kepercayaan yang tinggi akan tetap bertahan diantara penghambat yang dialami dalam program/strategi tersebut. Keaslian memandu pelaksana untuk tetap dalam aliran program yang telah ditata dalam quedeline program. Tanggung jawab dan keasliannya memberinya lebih banyak energi

⁴Dwiyanto.2009. *kebijakan public berbasis dyanamic policy analysis*.yogyakarta:gava media .hlm.2

⁵ Nugroho, Riant. 2009. *public policy*. Elex Media Komputindo: Jakarta. Hlm 636

dengan andal melakukan fase-fase program. Mentalitas berbasis suara akan membangun kesan yang baik dari praktisi dan pengaturan di hadapan orang-orang dari pertemuan objektif. Mentalitas ini akan mengurangi oposisi daerah dan mendorong rasa percaya dan khawatir untuk pertemuan objektif terhadap pelaksana dan proyek/pengaturan

- d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme, implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang diutamakan

3. Stunting

Stunting adalah keadaan ketidakmampuan untuk berkembang pada anak (pembangunan otak dan tubuh) karena rasa lapar yang cukup lama. Oleh karena itu, anak-anak lebih terbatas atau lebih terbatas daripada anak-anak biasa seusia mereka dan memiliki penundaan dalam berpikir. Sebagian besar disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan. Hambatan adalah status sehat berdasarkan perkiraan BB/U atau TB/U dimana dalam aturan antropometrik evaluasi status kesejahteraan anak seharusnya singkat dengan asumsi hasil estimasi

berada di ujung. (*Z-Score*) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/stunted) dan <-3 SD (sangat pendek/*severely stunted*)

Prevalensi *stunting* mulai meningkat pada usia 90 hari, kemudian, pada saat itu, sistem penghalang memanggil kembali ketika anak berusia 3 tahun. Ada kontras dalam terjemahan terjadinya hambatan antara dua kelompok usia anak-anak. Pada anak-anak di bawah 2-3 tahun, itu menggambarkan proses ketidakmampuan untuk berkembang atau menghambat yang masih berkembang / terjadi dan bagaimanapun dapat diperbaiki. Sedangkan pada anak yang berusia di atas 3 tahun menggambarkan bahwa anak mengalami kekecewaan perkembangan atau terhambat. Alasan untuk menghalangi dipisahkan menjadi: dua, yaitu: Penyebab langsung. Penyebab langsung termasuk masuknya makanan dan penyakit. Selanjutnya, penyebab yang menyimpang. Penyebab bundaran mencakup aksesibilitas dan contoh penggunaan keluarga, desain pengasuhan, sterilisasi alami, dan penggunaan layanan kesehatan. Ini tidak diatur oleh aset manusia, keuangan dan hierarkis melalui elemen instruktif. Alasan paling esensial untuk pengembangan dan perbaikan adalah masalah konstruksi politik, filosofis, dan keuangan yang bergantung pada kemampuan aset yang ada.⁶

1000 Hari Pertama Kehidupan adalah periode dari saat seorang anak dalam perut sampai seorang anak berusia dua tahun. Tahap ini dikenal

⁶Puteri, Natasha. 2020. "Monitoring Program Penanggulangan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Sunggal". Hal. 9.

sebagai Periode Emas karena selama ini pikiran menjadi cepat. Kesehatan yang sakit pada periode ini akan membawa bahaya yang sia-sia atau menghambat perkembangan di kemudian hari. Nutrisi yang cukup selama di dalam perut akan menyebabkan embrio berkembang dan dilahirkan ke dunia sebagai anak yang sehat, kokoh dan menakjubkan dalam setiap periode pergantian peristiwa dan perkembangannya. Poin menarik di 1000 hari awal kehidupan.

4. Electronic Human Development Worker (e-HDW)

Aplikasi eHDW atau e-Human Development Worker merupakan aplikasi yang dibina oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal PPMD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Desa PDTT. e-HDW Kota yang sebenarnya pertama kali dimaafkan oleh Menteri Desa Abdul Halim Iskandar terkait pengiriman aplikasi COVID-19 Desa Lawan. Jika aplikasi e-DMC dimanfaatkan untuk membantu Relawan Desa Lawan COVID-19 dalam menyelesaikan kegiatan dan mempersiapkan pemberian pelatihan dan data tentang COVID-19. Untuk sementara, e-HDW digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia untuk menyaring dan mendukung perluasan persatuan Intervensi Gizi untuk Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran).

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 13/5/20 oleh Kementerian Desa, aplikasi ini beberapa kali ditemui pembaruan. Tetap menyegarkan pada 25/6/20 dengan struktur 1.0.24 yang dapat digunakan dengan semua alat

android dan telah diunduh pada berbagai kesempatan. Ada dua transformasi unik yang dimanfaatkan Fasilitator Desa dan Kader Pembangunan Manusia. Hal ini direncanakan untuk mempermudah Kader Pembangunan Manusia dalam bekerja dan menyaring pameran KPM. Namun, dengan asumsi Anda melihat tampilan dan elemen dalam aplikasi, semuanya adalah sesuatu yang sangat mirip. Bagi Anda yang saat ini dipercaya sebagai Kader Pembangunan Manusia oleh Kepala Desa.

Aplikasi e-HDW adalah aplikasi *portable* berbasis android sebagai bantuan pekerjaan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Unduh panduan aplikasi e-HDW total sehingga KPM dapat dengan mudah mengumpulkan informasi tentang fokus keluarga untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (KPK) dan Pemantauan 5 (lima) paket administrasi penghindaran di kota.

Metode Penelitian

Strategi eksplorasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah strategi subjektif yang jelas dengan prosedur pemilihan informasi melalui persepsi, pertemuan dan dokumentasi yang diperoleh dari saksi-saksi penelitian yang telah ditetapkan untuk menguraikan bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi e-HDW dalam menurunkan angka *stunting*. Menurut Nawawi dan Martini Pemeriksaan ekspresif subyektif adalah penelitian yang melukiskan atau melukiskan objek eksplorasi berdasarkan realitas yang tampak atau sebagaimana adanya. Menurut Mukhtar, pemeriksaan

subjektif yang jelas terlihat untuk menggambarkan setiap efek samping atau keberatan saat ini, khususnya kondisi manifestasi seperti apa pada saat eksplorasi diarahkan.

Berdasarkan penilaian di atas, yang dimaksud dengan pemeriksaan ekspresif subyektif adalah penelitian yang menggambarkan objek eksplorasi dalam kaitannya dengan realitas saat ini. Spesialis menggunakan pendekatan eksplorasi ini karena sesuai dengan jenis pemeriksaan yang harus diselesaikan, terutama untuk menggambarkan apakah itu layak atau tidak. penggunaan aplikasi e-HDW dalam menurunkan angka hambatan di Kabupaten OKU. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah informasi penting yang diperoleh dari pertemuan dan informasi opsional seperti: dokumentasi data-data tentang stunting dan tata cara penggunaan e-HDW. adapun informan dalam penelitian kualitatif ini yaitu beberapa dari anggota KPM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan masyarakat yang menjadi kelompok posyandu.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi penggunaan *Electronic Human Development Worker* dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan teori pengukuran Implementasi Kebijakan Model *George C. Edward III* yang terdiri dari 4 Indikator yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi ialah sebagai suatu proses peralihan informasi antar individu baik dengan sebuah sistem, perlambangan, tanda, perilaku atau sikap.⁷ Korespondensi benar-benar memutuskan hasil dari pencapaian tujuan melaksanakan strategi terbuka. Peredaran surat menyurat yang baik akan benar-benar ingin membuat pelaksanaan yang layak juga. Adapun indikator dari keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari adanya reaksi yang diberikan oleh penerima pesan sama dengan asumsi sumber pesan, maka pada saat itu korespondensi bergerak sesuai harapan dan efektif serta sebaliknya..⁸

Menurut Endang Lestari terdapat 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif yaitu :⁹

1. Kejelasan
Ini menyiratkan bahwa korespondensi harus menggunakan bahasa dan bundel data secara jelas sehingga secara efektif diakui dan dirasakan oleh komunikan.
2. Ketepatan
Ketepatan atau presisi ini menyangkut penggunaan bahasa yang tepat dan realitas data yang disampaikan.
3. Konteks

⁷ Anita Tri Widayanti, Romula Adiono. *Manajemen Koleksi*. (Malang : UB Press. 2020) Hal : 241

⁸ Nofrion. *Komunikasi Pendidikan*. Jakarta : Katalog Dalam Terbitan 2016. Hal : 66

⁹ Arie Cahyono. *Unggul Berkomunikasi*. (Ponorogo. Uwais Inspirasi Indonesia. 2019), Hal : 33

Setting atau biasa disinggung sebagai keadaan menyiratkan bahwa bahasa dan data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi dan iklim di mana korespondensi terjadi.

4. Alur

Perkembangan bahasa dan data yang akan diperkenalkan harus diatur dengan alur yang wajar atau tepat sehingga pihak yang mendapatkan data bergegas untuk menjawab.

5. Budaya

Sudut ini tidak hanya menyangkut bahasa dan data tetapi juga berhubungan dengan kebiasaan dan moral, benar-benar bermaksud bahwa dalam menyampaikan, Anda harus menyesuaikan dengan cara hidup orang yang Anda ajak bicara..

Jika ke 5 aspek tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat dikatakan proses komunikasi yang dilakukan sudah berhasil atau efektif. Karena Pola Komunikasi antar Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan anggota Kader Pembangunan Manusia penulis menyimpulkan bahwa sudah efektif karena berdasarkan dokumentasi dan materi yang disosialisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Sumber Daya

Mungkin sudut utama dalam menawarkan jenis bantuan publik ke daerah adalah bagian dari SDM atau perwakilan. Ini dengan alasan bahwa perwakilan adalah sumber daya negara yang memutuskan apakah

administrasi publik diberikan kepada daerah setempat.¹⁰ Sumber daya tersendiri Seperti yang ditunjukkan oleh Werther dan Davis dalam Sutrisno, pekerja siap, mahir dan waspada dalam mencapai tujuan hierarkis.. Sumber Daya Penghibur utama dalam pelaksanaan strategi adalah staf atau Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk sumber daya e-HDW terdiri pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu satu orang admin pengelola pusat dan anggota kader pembangunan manusia setiap desa.

Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa anggota Kader Pembangunan Manusia dipilih oleh Kepala Desa dengan kriteria mampu dan mengetahui akan masalah kesehatan yang ada didesa nya lebih spesifiknya seperti Bidan Desa, Kader Posyandu yang sebelumnya sudah menjadi kader cukup lama sehingga cukup mengetahui masalah kesehatan khususnya stunting . Pada proses ini telah dilaksanakan sangat baik dimana saat ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki Kader Pembangunan Manusia yang sesuai dengan kriteria.

Selain Sumber Daya, fasilitas pendukung seperti pengadaan sarana dan prasarana tentunya sangat berpengaruh kepada keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Apabila sebuah kebijakan tidak didukung dengan fasilitas sarana dan prasana yang memadai maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas pendukung sangatlah penting jika tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik maka

¹⁰ Dahyar Daraba. *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. (Makassar. Leisyah. 2019) Hal : 194

Implementasi dari penggunaan e-HDW tidak dapat berjalan dengan maksimal untuk itu dengan didukung dengan fasilitas yang baik diharapkan e-HDW bisa berjalan sebagaimana fungsinya.

3. Disposisi

Sikap menurut Edward III dalam Widodo adalah kemampuan, keinginan dan kecenderungan pelaku strategi untuk menyelesaikan pendekatan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dari aransemen dapat dipahami.. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien para pelaksana (Implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.¹¹

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada tiga macam komponen reaksi yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu program, yaitu: Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap program; Arah respon para pelaku program; dan Intensitas terhadap program. Ketiga elemen ini akan dijelaskan bersamaan dengan hasil penemuan yang ada di lapangan

1. Pengetahuan, Pemahaman dan Pendalaman terhadap Program Pemahaman mengenai maksud umum dari suatu standar dan tujuan

¹¹ Dwi Putranto Riau. *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*. (Sidoarjo : Zifatama Jawa. 2019), Hal : 136

kebijakan adalah penting karena bagaimanapun juga, implementasi kebijakan yang berhasil bisa menjadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya memperhatikan pedoman dan target strategi

2. Disposisi pelaksana terhadap aturan prosedur dan target juga penting. menghasilkan hasil. Praktisi dapat lalai menjalankan strategi karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu pendekatan, tempat sebaliknya adalah pengakuan yang luas dan investigasi atas ke bawah pedoman strategi dan target di antara pelaksana strategi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kemampuan eksekusi strategi yang luar biasa

3. Intensitas terhadap kebijakan

Kekuatan sikap pelaksana strategi dapat mempengaruhi pelaksanaan pengaturan sesuai kebutuhan atau kekuasaan yang terbatas akan membawa kekecewaan terhadap pelaksanaan strategi.

Berdasarkan elemen respon yang dijelaskan di atas maka hasil penelitian pada disposisi Pengetahuan, Pengalaman dan Pemahaman Program oleh Kader Pembangunan Manusia belum sepenuhnya efektif karena masih ada kader KPM yang kemampuannya kurang dalam mengoperasikan e-HDW terutama kepada KPM yang sudah tua karena elemen yang sangat penting dalam sebuah disposisi adalah pengetahuan, dan

berdasarkan hasil wawancara untuk arah respon atau tanggapan kebijakan KPM dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak mendapat penolakan dari KPM dan oihak pelaksana program ini. Dan untuk intensitas tanggapan masih kurang efektif dikarenakan masih ada kader KPM yang kesulitan jaringan dalam pengoperasian aplikasi e-HDW.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Struktur Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKU sudah jelas, dimana admin induk pengelola aplikasi sudah diberikan Surat Perintah (SK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pekerjaan, dalam menjalankan peranannya diharapkan admin dan anggota KPM dapat mempedomani ketentuan tersebut sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan akan ada pertanggung jawabannya. SOP akan menuntun para pejabat dalam menyelesaikan tugas serta kinerja pejabat yang bersangkutan dapat lebih terarah dan optimal. SOP yang dilakukan yang rentan tidak bisa dilakukan KPM karena suatu hal yaitu cara pelaporan seringkali kader KPM tidak melakukan laporan bulanan. SOP yang dimaksud seperti yang terlampir dalam skripsi ini yaitu Mekanisme alur pelaporan dilaksanakan Sesuai dengan SOP yang merujuk pada SOP dari pusat, adapun alurnya yaitu Kader KPM melakukan pendataan didesa, pusat layanan, dan keluarga. lalu kemudian menggunakan aplikasi e-HDW dalam pendataan dan pemantauan layanan, kemudian diagnostik dan

rekomendasi dari e-HDW oleh KPM diserahkan ke forum rembuk stunting desa, dan Dashboard kabupaten dikelola oleh Dinas PMD Kabupaten untuk memonitor status konvergensi.

Dari 4 unit analisis diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi penggunaan e-hdw oleh KPM sangat membantu kinerja KPM. KPM diberikan sosialisasi dan pengarahan sehingga dalam konteks Komunikasi, Disposisi, dan Sumber Daya sudah memenuhi akan tetapi dalam struktur birokrasi ada satu hal yang tidak dilakukan oleh pihak Dinas PMD yaitu tidak memeberikan peluang kepada KPM untuk ikut serta dalam pembahasan hasil data e-hdw lebih lanjut dengan Dinas lainnya padahal KPM yang paling mengetahui kondisi dilapangan. Sehingga disini ada semacam ruang kendali terputus antara KPM dengan PMD dalam konteks menurunkan angka stunting.

5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan penjelasan informan Terdapat 3 Indikator faktor pendukung dalam menjalankan Implementasi e-HDW yaitu dukungan dari kasi lembaga adat dimana Kasi cepat dalam memantau laporan. Selanjutnya dukungan dari admin pemegang Dashboard e-HDW yang cepat memantau laporan yang masuk serta faktor pendukung terakhir ialah fasilitas sarana dan prasana yang memadai bagi anggota Kader Pembangunan Manusia dan admin Dashboard. Sedangkan faktor penghambat dalam menjalankan aplikasi e-HDW pertama sistem ini berbasis android masih belum stabil karena adanya perubahan program pada android yang bersifat open-

source, petugas layanan seperti kader posyandu, bidan desa tidak bersedia memberikan data layanannya sehingga mempersulit KPM dalam mencatat laporan dan Selanjutnya faktor sinyal jaringan yang mengakibatkan laporan sulit tersampaikan mengingat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diketahui memiliki sebanyak 157 Desa tentunya masih banyak terdapat wilayah yang jaringan sinyalnya lemah atau tidak memungkinkan untuk dapat membuat laporan dan yang terakhir ialah Belum adanya alokasi dana insentif untuk KPM sehingga KPM kurang aktif.

Kesimpulan

E-HDW dalam pelaksanaannya dari tahun 2020 sampai sekarang telah berjalan sesuai dengan surat edaran menteri PDPT, Pada Bidang Komunikasi yang dilakukan dalam pelatihan penggunaan aplikasi e-HDW memiliki 2 indikator yaitu bimbingan teknis kepada anggota Kader Pembangunan Manusia dan Sosialisasi kepada masyarakat pola komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan anggota Kader Pembangunan Manusia benar adanya karena sosialisasi dalam bentuk pelatihan sudah berjalannya sebanyak 3x dalam satu tahun di Kabupaten OKU hal tersebut sudah jelas pola komunikasi antar Dinas dan masyarakat sudah berjalan baik. Untuk Disposisi terkait dengan kecenderungan pelaksana dalam implemementasi kebijakan tidak ada masalah mengingat e-HDW dikelola oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai admin

Dashboard yang diangkat melalui kebijakan Kepala Daerah dan aplikasi itu digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia. ASN dan anggota Kader Penguasaan Manusia yang membidangi dituntut harus mampu menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya. Terkait Struktur Birokrasi, Admin *Dashboard* telah diberikan Surat Keputusan dari Bupati Ogan Komering Ulu dan anggota Kader Pembangunan Manusia telah diberikan Surat Keputusan dari Desa masing-masing.

Aplikasi e-HDW berbasis android pada lokasi dengan jaringan internet tidak stabil sering mengalami gangguan sehingga perlu disediakan e-HDW berbasis web, Perlunya penambahan menu pada e-HDW agar terintegrasi dengan SID(Sistem Informasi Desa), Perlunya pertemuan secara rutin dengan melakukan Rapat Koordinasi antara admin *dashboard* dengan kader KPM, membahas kendala yang dialami pada saat pelaporan oleh KPM sehingga kedepannya tidak ada lagi informasi mengenai masih ada KPM yang tidak paham dalam menjalankan e-HDW dan agar tidak ada lagi kader KPM yang tidak aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Tri Widayanti, Romula Adiono. *Manajemen Koleksi*. (Malang : UB Press. 2020)
- Arie Cahyono. *Unggul Berkomunikasi*. (Ponorogo. Uwais Inspirasi Indonesia. 2019)
- Dwi Putranto Riau. Otentikasi Kelayakan untuk Fungsi

- Bangunan . (Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2019).
- Nawawi,H. 2007. *Metode penelitian sosial*. Gajah madah press. Yogyakarta
- Nofrion. *Komunikasi Pendidikan*. Jakarta : Katalog Dalam Terbitan 2016
- Norsanti.2021 "*Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan(Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar).*" *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 3
- Peraturan Menteri PDPTT Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlunya Pemanfaatan Aset Kota Tahun 2019, pasal 6
<https://dpmd.okukab.go.id/sejarah/>
diakses pada 8 januari 2022
pukul 15;05